

**PENGARUH PENDAPATAN TRANSFER DESA DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PDRB SERTA DAMPAKNYA PADA ANGKA
KEMISKINAN DI KABUPATEN MINAHASA**

Joike Ishak Ondang¹, Vecky A.J. Masinambow², Daisy S.M. Engka³

Email: joikeishak@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan transfer desa dan belanja modal terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa serta dampaknya terhadap kemiskinan. Belanja modal atau pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan PDRB sedangkan dana transfer desa akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekaligus mampu menurunkan angka kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sedangkan alat analisis adalah analisis jalur. Menurut *Webley* (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan memberikan estimasi tingkat kepentingan (*Magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (*Sugiono*, 2012:1). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB sedangkan belanja modal berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa. Secara keseluruhan atau simultan, Pendapatan transfer desa dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dan PDRB berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa. Secara keseluruhan, ketiga variabel Pendapatan Transfer desa, Belanja Modal, dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata Kunci : PDRB, Pendapatan Transfer, Belanja Modal dan Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a condition of economic inability to meet the average standard of living of the people in an area. This condition of inability is indicated by the low ability of income to meet basic needs in the form of food, clothing and shelter. This low income ability will also result in a reduced ability to meet average living standards such as public health standards and education standards. The problem of poverty also occurs in Minahasa District, where the local government with the available resources is trying to reduce the poverty rate through poverty reduction policies and programs. For this reason, the purpose of this study is to see whether the transfer income and capital expenditure have an effect on GRDP and its impact on poverty in Minahasa Regency. The results showed that transfer income has a positive and statistically significant effect on GRDP, while capital expenditure has a negative but not statistically significant effect on GRDP in Minahasa Regency. Overall or simultaneously, village transfer income and capital expenditure have a

significant effect on the value of GRDP. The results showed that village transfer income had a negative but not statistically significant effect on poverty, while capital expenditure had a positive and insignificant effect on poverty and GRDP had a negative but statistically insignificant effect on poverty in Minahasa District. Overall, the three variables of Village Transfer Income, Capital Expenditure, and GRDP have a significant effect on poverty.

Keyword : GRDP, Transfer Income, Capital Expenditures and Poverty

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan sektor ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode (Sasana, 2006). PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada dalam suatu provinsi kabupaten/kota. Tinggi rendahnya angka PDRB akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan, sedangkan faktor yang mempengaruhi PDRB adalah antara lain Belanja Modal dan Dana Transfer Desa. Kenaikan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator membaiknya perekonomian daerah, meningkatnya kegiatan masyarakat, terciptanya kesempatan kerja dan sebaliknya menurunnya angka PDRB mengindikasikan terjadinya kontraksi ekonomi.

Berikut ini disajikan perkembangan angka PDRB untuk kurun waktu 10 tahun kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (ADHK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2020 (Jutaan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1	Bolaang Mongondow	5 487 883,79	5 444 314,30	5 060 106,71	4 707 458,71	4 413 199,20	4 141 599,70	3 911 380,40	3 705 497,70	3 473 725,10	3 306 235,50	3 218 539,40
2	Minahasa	11 681 361,40	11 803 487,16	11 159 065,35	10 517 440,91	9 915 909,00	9 349 470,20	8 806 209,30	8 277 510,00	7 794 591,00	7 317 099,30	6 888 255,70
3	Kepulauan Sangihe	3 025 233,15	3 010 234,07	2 855 315,99	2 706 570,89	2 566 764,40	2 419 696,50	2 281 136,10	2 163 380,20	2 048 629,10	1 940 811,10	1 867 626,60
4	Kepulauan Talaud	1 611 721,55	1 604 807,96	1 532 887,46	1 459 636,15	1 388 746,40	1 319 041,50	1 253 542,60	1 191 788,30	1 132 902,90	1 079 323,80	1 047 200,30
5	Minahasa Selatan	6 073 028,27	6 120 452,81	5 775 770,07	5 444 337,29	5 110 814,50	4 863 501,10	4 575 077,70	4 287 793,60	4 022 084,80	3 789 756,70	3 649 941,10
6	Minahasa Utara	9 277 453,15	9 364 327,72	8 819 578,44	8 288 057,51	7 781 693,70	7 269 076,70	6 791 620,40	6 318 070,90	5 909 892,70	5 516 996,30	5 164 568,40
7	Bolaang Mongondow Utara	1 691 066,54	1 679 213,97	1 581 646,56	1 489 523,40	1 401 509,80	1 320 203,20	1 247 860,30	1 168 294,60	1 090 624,70	1 020 031,40	968 405,40
8	Kepulauan Sitaro	1 610 523,77	1 594 048,04	1 494 625,22	1 400 432,43	1 308 886,00	1 223 203,00	1 143 055,20	1 062 667,40	983 814,40	909 354,30	849 530,90
9	Minahasa Tenggara	3 614 410,43	3 637 719,06	3 432 322,71	3 238 027,65	3 044 362,20	2 863 530,20	2 693 963,40	2 527 706,00	2 375 259,40	2 234 172,40	2 131 968,20
10	Bolaang Mongondow Selatan	1 336 974,18	1 328 571,46	1 248 799,33	1 171 958,58	1 103 135,60	1 039 393,70	980 918,80	912 717,50	851 326,60	795 897,10	753 907,10
11	Bolaang Mongondow Timur	1 881 782,35	1 878 469,77	1 792 386,87	1 706 002,12	1 613 813,50	1 528 600,30	1 435 603,20	1 341 909,50	1 257 668,10	1 179 723,90	1 113 867,40
12	Kota Manado	24 780 882,57	25 580 614,86	24 126 539,48	22 622 639,67	21 193 827,10	19 773 191,60	18 584 851,80	17 419 698,00	16 255 155,80	15 176 424,80	14 078 270,30
13	Kota Bitung	11 325 095,84	11 171 831,02	10 735 834,24	10 127 353,10	9 537 544,90	9 064 842,40	8 755 304,70	8 229 152,20	7 715 400,10	7 247 816,10	6 845 769,60
14	Kota Tomohon	3 150 486,27	3 163 458,43	2 963 090,39	2 792 169,57	2 565 300,00	2 462 138,00	2 322 072,70	2 186 140,30	2 060 549,20	1 926 919,80	1 804 312,10
15	Kota Kotamobagu	2 397 215,40	2 392 383,37	2 254 152,50	2 113 409,26	1 979 106,10	1 855 963,50	1 742 349,00	1 632 889,10	1 525 280,20	1 426 088,70	1 339 171,40
	Sulawesi Utara	88 126 373,99	89 009 264,78	84 249 720,17	79 484 025,02	74 764 660,50	70 425 330,20	66 360 757,00	62 422 498,50	58 677 586,70	54 910 897,50	51 721 334,10

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 2021

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara PDRB tertinggi Kota Manado kemudian Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara. Selanjutnya informasi perkembangan PDRB dapat dilihat pada tabel 1.

Pemerintah daerah melalui APBD membuat kebijakan dalam bentuk program termasuk dengan belanja modal dan dana transfer desa untuk menekan angka kemiskinan. Kemiskinan adalah

suatu kondisi dimana sebagian anggota masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara berkualitas. Selain itu masyarakat yang digolongkan miskin adalah jika tidak mampu membiayai kesehatan, pendidikan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tingkat pendapatan yang diperolehnya.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2020 (Ribu Jiwa)

No	Kabupaten/Kota	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
1	Kab. Bolaang Mongondow	18,07	18,30	18,49	19,05	19,55	20,04	19,80	20,20	17,10	18,60	20,80
2	Kab. Minahasa	24,95	24,32	24,49	26,34	27,64	28,88	27,83	28,50	22,90	24,90	27,90
3	Kab. Kepulauan Sangihe Talaud	14,64	14,62	15,46	15,38	15,95	15,87	15,30	15,70	13,60	14,90	16,70
4	Kab. Kepulauan Talaud	8,84	9,10	8,68	8,84	9,22	8,92	8,74	9,00	7,80	8,50	9,50
5	Kab. Minahasa Selatan	19,38	19,49	19,54	20,26	20,42	20,88	20,07	20,40	17,30	18,80	21,00
6	Kab. Minahasa Utara	14,33	14,09	14,13	14,93	15,71	16,03	15,26	15,70	12,90	14,10	15,80
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara	6,82	6,77	6,84	6,95	7,22	7,38	7,00	7,20	5,90	6,40	7,20
8	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	5,95	6,35	6,53	6,81	6,96	7,15	7,21	7,40	6,10	6,70	7,50
9	Kab. Minahasa Tenggara	13,73	14,22	14,73	15,57	16,19	17,45	16,39	16,60	14,60	15,80	17,70
10	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	8,53	8,74	8,82	9,05	9,35	9,40	9,21	9,20	9,00	9,60	10,70
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	4,30	4,41	4,29	4,37	4,69	4,73	4,49	4,60	4,10	4,50	5,00
12	Kota Manado	25,55	23,89	23,21	23,39	22,41	23,96	20,38	20,50	20,50	22,40	25,10
13	Kota Bitung	14,18	14,10	14,34	14,00	13,64	14,13	12,87	12,90	14,60	16,10	18,00
14	Kota Tomohon	6,06	5,99	6,25	6,69	6,63	6,77	6,26	6,40	5,60	6,10	6,80
15	Kota Kotamobago	7,06	7,31	7,49	7,28	7,24	6,95	6,76	6,90	6,60	7,20	8,10
	Sulawesi Utara	192,37	191,70	193,31	198,88	202,82	208,54	208,23	201,10	178,70	194,70	217,80

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara 2021

Berdasarkan data BPS Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2010 kemiskinan di Kabupaten Minahasa sebesar 27,90 ribu jiwa, Tahun 2012 mengalami penurunan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 22,90 ribu jiwa tetapi pada tahun berikut 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar sehingga menjadi 28,50 ribu jiwa, sempat turun pada tahun 2014 sebesar 27,83 ribu jiwa tetapi mengalami peningkatan Kembali pada tahun 2015 sebesar 28,88 ribu jiwa. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 24,32 ribu jiwa (BPS Kab. Minahasa, 2010-2019).

Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut seperti adanya program Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Belanja Modal. Salah satu tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Nurcholis, 2011 : 90). Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa pada tahun 2010 sebesar Rp 11.500.000.000,- dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2016 sebesar Rp. 69.416.899.000,-. Pada Tahun 2017 sedikit mengalami penurunan sebesar Rp. 68.983.458.140,- juga pada Tahun 2018 sebesar Rp. 68.647.215.500 tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan Kembali sebesar Rp. 72.075.133.000,-. Pada tahun 2020 ADD mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 69.130.183.500 (Sumber Bidang Anggaran BPKAD Kab.

Minahasa). Sumber pendapatan desa yang lain adalah Dana Desa. Pada tahun 2015 jumlah Dana Desa di Kabupaten Minahasa adalah sebesar Rp 59.997.140.000,- terus mengalami peningkatan sampai Tahun 2017 sebesar Rp. 171.641.516.000,-. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 151.906.617.000,-, tetapi pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 170.062.089.000,-. Pada tahun 2020 Dana desa mengalami kenaikan sebesar Rp. 170.710.121.000.

Tabel. 3
Pendapatan Transfer Desa (Dana Desa & Alokasi Dana Desa)

TAHUN	PENDAPATAN TRANSFER DESA
2010	11.500.000.000
2011	10.345.000.000
2012	12.305.000.000
2013	16.815.800.000
2014	24.777.400.000
2015	123.873.355.800
2016	204.020.151.000
2017	240.624.974.140
2018	220.553.823.500
2019	242.137.222.000
2020	239.840.304.500

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kab. Minahasa.

Data menunjukkan untuk pendapatan transfer desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada tahun 2010 sebesar Rp. 11.500.000.000 akan tetapi pendapatan transfer desa untuk Kabupaten Minahasa pada tahun 2011 mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 10.345.000.000. pada tahun 2012 mengalami peningkatan pendapatan transfer desa sehingga menjadi Rp. 12.305.000.000 dan terus meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp. 16.815.800.000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 123.873.355.800. pendapatan transfer desa Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 240.624.974.140 akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 220.553.823.500, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 242.137.222.000 dan pada tahun 2020 pendapatan transfer desa Kabupaten Minahasa turun menjadi Rp. 239.840.304.500. Tujuan penggunaan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berikut adalah perkembangan belanja modal di Kabupaten Minahasa dalam kurun waktu 2010-2020.

Tabel. 4
Belanja Modal Tahun 2010-2020

TAHUN	Belanja Modal
2010	148,126,166,500.00
2011	137,042,394,419.00
2012	82,206,168,110.00
2013	146,063,029,263.00
2014	206,190,854,710.00
2015	251,758,907,430.00
2016	345,504,118,314.00
2017	209,872,194,122.00
2018	172,850,452,990.00
2019	194,102,964,868.00
2020	182,093,259,303.00

Sumber : Bidang Anggaran BPKAD Kab. Minahasa.

Berdasarkan table diatas dapat dilihat perkembangan belanja modal dari tahun 2010 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan atau fluktuasi. Pada tahun 2010 belanja modal untuk Kabupaten Minahasa sebesar 148,126,166,500.00 juta rupiah mengalami penurunan anggaran belanja modal sampai tahun 2012 menjadi 82,206,168,110.00 juta rupiah. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan anggaran belanja modal sebesar 146,063,029,263.00 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan anggaran belanja modal sampai tahun 2016 sebesar 345,504,118,314.00 juta rupiah. Pada tahun 2017 anggaran belanja modal Kabupaten Minahasa mengalami penurunan menjadi 172,850,452,990.00 juta rupiah, pada tahun 2019 naik menjadi 194,102,964,868.00 juta rupiah akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan anggaran belanja modal untuk Kabupaten Minahasa sebesar 182,093,259,303.00 juta rupiah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan. Belanja modal berfungsi sebagai pemicu dan pemelancar terlaksananya pembangunan ekonomi daerah dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat lebih cepat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian berjudul “ **Pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal Terhadap PDRB serta dampaknya pada Angka Kemiskinan di Kabupaten Minahasa**”

Perumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa?
2. Apakah Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB berpengaruh terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Minahasa?

3. Apakah Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa?
4. Apakah Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Minahasa.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal secara bersama-sama atau simultan terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa
4. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB secara bersama-sama atau simultan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan PDRB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi disatu daerah dalam suatu tahun tertentu.

Pendapatan Transfer Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. **Pendapatan Transfer Desa** terdiri atas jenis:

1. Dana Desa;
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota, dapat bersifat umum dan khusus.

Dana Desa

Dana Desa adalah anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Dana ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk

pembangunan di desa supaya tercipta desa yang lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

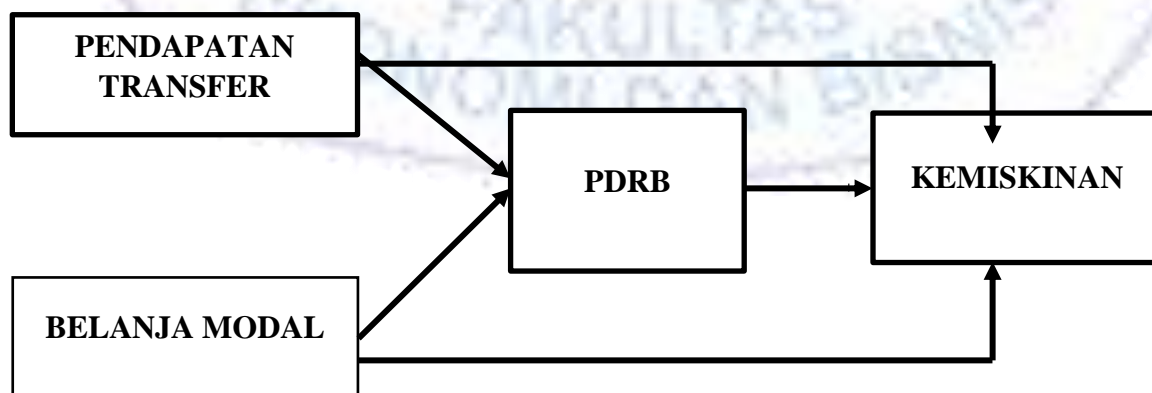
1. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
2. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll),

Belanja Modal

Belanja Modal menurut Halim (2008: 101) merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran Teoritis



Dari gambar 1 menjelaskan bagaimana Pendapatan Transfer dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari berbagai instansi terkait sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening.

Rutherford (1993) menjelaskan bahwa Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regres berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung, Sedangkan menurut Webley (1997) mengatakan analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Sugiono,2012:1).

Hasil Estimasi dan Pembahasan

Berikut hasil regresi untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Transfer, Belanja Modal terhadap PDRB dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode *Path Analysis* (analisis jalur).

Persamaan Substruktur 1

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews 08 untuk mengetahui pengaruh antara variabel PDRB (Y₁) (variabel dependen) dengan Pendapatan Transfer Desa (X₁) dan Belanja Modal (X₂) (variabel independen). Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

$$Y_1 = a_1X_1 + a_2X_2 + e_t$$

$$Y_1 = 1.62E-05 (X_1) - 2.84E-06 (X_2) + 0,107 e_t$$

Tabel 5
Hasil Regresi Persamaan Substruktur 1
Pendapatan Transfer (X₁) dan Belanja Modal (X₂) terhadap PDRB (Y₁)

Variabel	Coefficient	t- statistic	Probabilitas
(X1)	1.62E-05	7.399131	0.0001
(X2)	-2.84E-06	-0.828244	0.4315
R ² = 0.893		F- statistik = 33.65524	

Sumber : Data olahan Eviews Ver 08

Uji Parsial (Uji t)

Hasil persamaan regresi Pendapatan transfer desa (X_1) pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan transfer desa (X_1) terdapat nilai sig 0.0001. Nilai sig lebih kecil dari α 5%, maka H_a diterima H_o di tolak. variabel Pendapatan transfer desa (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 7.399131 dan t_{tabel} 2.718. Jadi, t_{hitung} 7.399131 > t_{tabel} 2.718 Artinya ada hubungan linier antara Pendapatan transfer desa (X_1) dengan PDRB (Y_1). Jadi, dapat disimpulkan Pendapatan transfer desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Hasil persamaan regresi Belanja Modal (X_2) pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel Belanja Modal (X_2) terdapat nilai sig 0.4315. Nilai sig lebih kecil dari α 10%, maka H_a ditolak H_o diterima variabel Pendapatan transfer desa (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.828244 dan t_{tabel} 1.812. Jadi, t_{hitung} 0.828244 < t_{tabel} 1.812 Artinya tidak ada hubungan linier antara Belanja Modal (X_2) dengan PDRB (Y_1). Jadi, dapat disimpulkan Belanja Modal memiliki pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap PDRB.

Koefisien Determinan (R^2)

Hasil output Eviews versi 08 diatas, diketahui pada persamaan substruktur 1 dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh nilai Pendapatan Transfer Desa (X_1) dan Belanja Modal (X_2) terhadap PDRB (Y_1). Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.893 atau 89.3%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas PDRB yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel Pendapatan Transfer Desa serta Belanja Modal adalah sebesar 89.3% sedangkan sisanya sebesar 10.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Uji Simultan (Uji f)

Secara keseluruhan, Pendapatan transfer Desa dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 33.65524 yang lebih besar dari pada nilai F_{tabel} sebesar 4.6 pada tingkat keyakinan 95%.

Persamaan Substruktur 2

Berikut ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan Eviews untuk mengetahui pengaruh antara Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal, dan PDRB Terhadap Kemiskinan. Hasil regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

$$Y_2 = a_1X_1 + a_2X_2 + a_3Y_1 + e_t$$

$$Y_2 = -2.32E-13 (X_1) + 6.27E-12 (X_2) -4.22E-07 (Y_1) + 0,306$$

Tabel 6
Hasil Regres Persamaan Substruktur 2
Pendapatan Transfer Desa(X_1) Belanja Modal (X_2) dan
PDRB (Y_1) Terhadap Kemiskinan (Y_2)

Variabel	Coefficient	t- statistic	Probabilitas
(X_1)	-2.32E-13	-0.043430	0.9666
(X_2)	6.27E-12	2.007874	0.0846
(Y)	-4.22E-07	-1.365290	0.2144
$R^2 = 0.694$		F- statistic = 5.315691	

Sumber : Data olahan Eviews Versi 08

Uji Parsial (Uji t)

Hasil output *Eviews* diatas, diketahui pada persamaan struktur II dalam model penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan melalui PDRB.

Hasil persamaan regresi Pendapatan Transfer Desa (X_1) pada tabel 6 dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Transfer Desa (X_1) tedapat nilai sig 0.9666. Nilai sig lebih kecil dari $\alpha 10\%$, maka H_a ditolak H_o diterima. variabel Pendapatan transfer desa (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 0.043430 dan t_{tabel} 1.812. Jadi, t_{hitung} 0.043430 < t_{tabel} 1.812 Artinya tidak ada hubungan linier antara Pendapatan Transfer Desa (X_1) dengan Kemiskinan (Y_2). Jadi, dapat disimpulkan Pendapatan Transfer Desa memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan.

Hasil persamaan regresi Belanja Modal (X_2) pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel Belanja Modal (X_2) tedapat nilai sig 0.0846. Nilai sig lebih besar dari $\alpha 5\%$, maka H_a ditolak H_o di terima. variabel Belanja Modal (X_2) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 2.007874 dan t_{tabel} 2.718. Jadi, t_{hitung} 2.007874 < t_{tabel} 2.718 Artinya tidak ada hubungan linier antara Belanja Modal (X_2) dengan Kemiskinan (Y_2). Jadi, dapat disimpulkan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

Hasil persamaan regresi PDRB (X_3) pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel PDRB (X_3) tedapat nilai sig 0.2144. Nilai sig lebih kecil dari $\alpha 10\%$, maka H_a ditolak H_o diterima. variabel PDRB (X_3) mempunyai nilai t_{hitung} yakni 1.365290 dan t_{tabel} 1.812. Jadi, t_{hitung} 1.365290 < t_{tabel} 1.812 Artinya tidak ada hubungan linier antara PDRB (X_3) dengan Kemiskinan (Y_2). Jadi, dapat disimpulkan PDRB memiliki pengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap Kemiskinan.

Koefisien Determinan (R^2)

Hasil estimasi memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.694 atau 69.4%. Nilai ini memiliki arti bahwa variabilitas Kemiskinan yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB adalah sebesar 69.4% sedangkan sisanya sebesar 30.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

Uji Simultan (Uji f)

Secara keseluruhan, ketiga variabel Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal, dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F_{stat} sebesar 5.315691 lebih besar daripada nilai F_{tabel} sebesar 4.35 pada tingkat keyakinan 95%.

Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara parsial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif (+) antara Pendapatan Transfer desa terhadap PDRB. Artinya, apabila pendapatan transfer desa mengalami peningkatan maka PDRB juga akan mengalami peningkatan begitu sebaliknya, *Ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan tranfer yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sudah dikelola dan digunakan dengan baik. Dana desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat mampu dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Minahasa dengan efektif untuk mendukung pembangunan desa sehingga kesejahteraan meningkat. Kesejahteraan menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat, ketika pendapatan meningkat maka akan dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa dilihat dari peningkatan PDRB.

Hasil peneiltian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap PDRB. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antara belanja modal dengan PDRB. Artinya, apabila belanja modal mengalami peningkatan maka PDRB akan mengalami penurunan begitu sebaliknya, *Ceteris paribus*. Hal ini diperkirakan bahwa pengeluaran untuk belanja modal lebih banyak digunakan untuk pembelian barang seperti mesin dan alat-alat kantor dibandingkan untuk pengeluaran untuk pembangunan. Artinya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lebih bersifat kontraksi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana kontraksi tersebut terjadi karena pemerintah Kabupaten Minahasa tidak menggunakan dana anggaran pendapatan belanja untuk mendorong dan memperlancar pembangunan ekonomi daerah dengan baik seperti membangun infrastruktur, irigasi, jaringan aset tetap lainnya.

2. Pengaruh Pendapatan Transfer Desa dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh pendapatan transfer desa dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Artinya bahwa kedua variabel ini memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan maupun penurunan PDRB di Kabupaten Minahasa. Walaupun secara parsial hanya pendapatan transfer desa yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB sedangkan belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan baik dalam peningkatan maupun penurunan PDRB. Akan tetapi secara bersama-sama kedua variabel ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB.

3. Pengaruh Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB terhadap Kemiskinan secara parsial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan negatif (-) akan tetapi hasil ini tidak signifikan secara statistik. Artinya, apabila pendapatan transfer desa mengalami kenaikan maka kemiskinan akan menurun begitu sebaiknya, *Ceteris paribus*. Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa cara pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui kebijakan alokasi dana desa dan dana desa yang digelontorkan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal. Walaupun secara teori dengan tanda negatif diartikan bahwa ketika pendapatan transfer meningkat maka kemiskinan akan turun begitu sebaliknya *ceteris paribus* akan tetapi penurunan angka kemiskinan belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan dikarenakan penggunaan dana hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja seperti jalan, drainase, pembuatan gapura atau batas desa, irigasi dan renovasi kantor desa karena pembangunan fisik tersebut tidak berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat hal ini sesuai dengan hasil penelitian Cut Putri Melita Sari (2019) yang menyimpulkan bahwa jumlah anggaran untuk pembangunan fisik tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi local guna meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum terlihat atau masih sangat minim. Sehingga walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan akan tetapi penurunan tersebut tidak terlalu signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara belanja modal dengan kemiskinan. Akan tetapi hasil ini tidak signifikan secara statistik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oldri, Paulus dan Tri (2019) yang menyimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Diharapkan dengan adanya anggaran dari pemerintah berupa belanja modal yang merupakan juga bagian dari belanja dimana dapat memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dianggarkan. Akan tetapi diperkirakan bahwa anggaran belanja modal yang didapatkan oleh

lebih banyak digunakan untuk pembelian-pembelian berupa alat-alat kantor dan asset lainnya sehingga belum mampu menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya apabila PDRB meningkat maka kemiskinan akan turun begitu sebaliknya *ceteris paribus*. Laju pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan peningkatan output secara nasional, output akan meningkat apabila faktor-faktor produksi pembentuknya juga mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan produksi berarti menunjukkan peningkatan produktivitas dalam suatu perekonomian, yang diharapkan juga mampu meningkatkan pendapatan perkapitanya. Meningkatnya pendapatan tersebut akan meningkatkan daya beli, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oldri, Paulus dan Tri (2019) yang menyimpulkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

4. Pengaruh Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB terhadap Kemiskinan secara bersama-sama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Desa, Belanja Modal dan PDRB terhadap Kemiskinan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Walaupun secara parsial menunjukkan bahwa ketiga variabel pendapatan transfer desa, belanja modal dan PDRB tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan maupun penurunan angka kemiskinan. Akan tetapi secara bersama-sama ketiga variabel ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDRB sedangkan belanja modal berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap PDRB di Kabupaten Minahasa.
2. Secara keseluruhan atau simultan, Pendapatan transfer desa dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan transfer desa berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan sedangkan belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan dan PDRB berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa.
4. Secara keseluruhan, ketiga variabel Pendapatan Transfer desa, Belanja Modal, dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kemiskinan.

Saran

Bagi pemerintah perlu adanya evaluasi terkait penggunaan dana pendapatan transfer desa dan belanja modal sehingga penggunaannya berjalan dengan efektif. Perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran khususnya ADD dan DD. Evaluasi yang dilakukan dalam hal ini bisa dilakukan seperti sosialisasi tentang peraturan pemerintah, pelatihan sumber daya manusia. Sehingga dapat mengurangi penggunaan dana di luar prioritas dan potensi penyalahgunaan dana desa. Implementasi dana desa yang efektif dan efisien akan mendukung pembangunan desa sehingga kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan akan berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim.2008. Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Darise, Nurlan. Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta:Index/2008
- Ernita, Cut Putri Melita Sari/ Pengaruh Penggunaan Dana Pembangunan Fisik Desa Terhadap Pngurangan Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen /2019
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN.
- Nuraini, I. (2017). Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur, 79–93.
- Nugroho, Heru. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan dan Kesenjangan. Yogyakarta : Aditya Media.
- Oldri O. Pantas, Paulus Kindangen, Tri Oldy Rotinsulu*/Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan Di Sulawesi Utara/2019
- Rutherford, R., (1993): Statistical Model For Causal Analysis, John Wiley and Sons Inc, New York.
- Sasana, Hadi. 2006. Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/Kota Provinsi jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan* Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 :145-170.
- Suliswanto, M. S. W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap angka kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 8, No.2. hlm: 357–366.
- Suryawati. 2004. Teori Ekonomi Mikro. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta
- Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Webley, Paul. 1997. “It Could Be OK! Predictors and Correlates of Participation in The National Lottery. In I. Quintanilla Pardo (Ed)”. *The 22nd IAREP Colloquium* (pp. 173-183). Valencia: Promolibro.